



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 896/IV/II/2016

I DPR DAN PRESIDEN SEPAKAT TUNDA REVISI UU KPK



DPR DORONG PENYELESIAN
**MASALAH TENAGA
HONORER**



KOMISI I TETAPKAN
DEWAS LPP RRI



SISTEM RUJUKAN DBD
KURANG MAKSIMAL



Jangan Lewatkan info DPR terkini
dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id



Ketua DPR Ade Komarudin bersama Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers

DPR DAN PRESIDEN SEPAKAT TUNDA REVISI UU KPK

Pimpinan DPR-RI dan Presiden RI Joko Widodo bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesepakatan ini muncul setelah Pimpinan DPR berkunjung ke Istana Presiden untuk melakukan rapat konsultasi. Turut menyertai Ketua DPR-RI, Ade Komarudin, para Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dan beberapa Pimpinan Fraksi dan Komisi serta Badan Legislasi.

Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai pertemuan mengungkapkan, rencana revisi Undang-Undang KPK memerlukan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan kesiapan yang matang. Menurutnya, penundaan ini juga akan

dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK, dan sosialisasinya kepada masyarakat,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (22/2).

Ketua DPR, Ade Komarudin dalam pernyataannya di tempat yang sama menjelaskan, meskipun pemerintah dan DPR bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK, namun DPR tidak menghapus revisi UU tersebut dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2016.

“Kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan saat ini, tetapi tidak menghapus dari daftar prolegnas. Waktu akan dipergunakan untuk memberi penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Akom di hadapan media.

Akom yang juga Politisi Partai GOLKAR ini mengungkapkan, penundaan revisi itu bukan disebabkan

oleh tekanan dari pihak manapun. Kesepakatan ini semata-mata merupakan usaha DPR dan pemerintah untuk menjalankan cara kerja kenegaraan dengan baik.

“Penundaan ini saya kira bukan karena tekanan siapapun, kami semata-mata secara bersama-sama bersepakat antara DPR dengan pemerintah untuk bagaimana agar seluruh mekanisme kenegaraan berjalan dengan baik,” tandas Akom.

Jokowi yang juga memperhatikan dinamika politik di DPR mengungkapkan, bahwa dirinya menghargai proses tersebut, sebagai upaya untuk mencari jalan terbaik bagi komisi antirasuah (KPK).

“Saya sangat menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rencana revisi Undang-Undang KPK. Dan tadi telah bicara banyak mengenai rencana revisi undang-undang KPK tersebut,” ungkap Jokowi.

Akom pun menambahkan, bawa semua pembahasan undang-undang sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945, harus dibahas antara dua lembaga negara yaitu DPR bersama pemerintah. *(eko,mp)/foto:naefurodji/parle/iw.*



Tiga RUU Jadi Prioritas DPR dan Pemerintah

Dalam rapat konsultasi Pimpinan DPR-RI Ade Komarudin, para Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dan beberapa Pimpinan Fraksi dan Komisi serta Badan Legislasi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Senin, (22/2) menyepakati tiga undang-undang yang menjadi prioritas bersama antara DPR dan Pemerintah RI.

"Ada beberapa undang-undang yang menjadi prioritas, disampaikan kepada Presiden dan seluruh jajaran. Ketiga RUU itu adalah RUU Tax Amnesty, RUU Terorisme, dan revisi Undang-Undang KPK," ujar Politisi dari F-GOLKAR dalam keterangan pers usai rapat konsultasi.

Akom-panggilan akrab Ketua DPR, menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty telah dirapatkan di forum Pimpinan DPR. Usai rapat konsultasi dengan presiden, rencananya akan dikemukakan pada forum rapat paripurna DPR. Akom pun menargetkan, RUU ini dapat diselesaikan pada masa persidangan III tahun sidang 2015/2016 ini.

"Esok hari kami akan menyampaikan di paripurna, dan kemudian

mengagendakan dalam Badan Musyawarah (Bamus) untuk segera dibahas. Dan kami bertekad agar segera diselesaikan dalam masa persidangan sekarang ini," papar Ketua PB HMI priode (1993 - 1998).

Selain RUU Tax Amnesty, Akom bersama para Anggota Dewan juga berkomitmen untuk segera membahas dan menyelesaikan RUU Terorisme. Adapun terkait revisi Undang-Undang KPK Pimpinan DPR dan Presiden RI Joko Widodo bersepakat menunda pembahasan revisi undang-undang tersebut. Sampai dilakukan sosialisasi, dan masyarakat mendapat pemahaman tentang rencana yang dimaksud.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dalam rapat konsultasi DPR bersama Presiden RI yang membahas tiga poin inti tersebut, suasana rapat berjalan relax. "Baru saja saya menerima kunjungan Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan Komisi terkait. Suasana pertemuan itu santai, membahas agenda-agenda legislasi nasional, termasuk rencana revisi Undang-Undang KPK," ungkap Jokowi di hadapan awak media. *(eko,mp)/foto: naefurodji /parle/iw.*



Ketua DPR-RI Ade Komarudin

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningyastuti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmad Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M.IIham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

SIRKULASI

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

Email

penerbitandpr@gmail.com

(isi berita dan materi foto
di luar tanggung jawab Bagian Penerbitan)

MAHASISWA KALAH MILITAN DENGAN BURUH

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengharapkan mahasiswa tidak kalah militan dalam gerakan kritis terhadap jalannya pemerintahan dengan elemen gerakan buruh. Bahkan dia juga menyindir, mahasiswa tidak lebih baik terorganisir dibandingkan buruh.

"Kalau saya lihat di kalangan buruh itu lumayan, buruh itu terorganisir dengan rapi, tuntutan-tuntutan mereka juga fokus, dan bahkan militan, kali ini saya melihat mahasiswa jauh kalah militan dari buruh. Benar, kalau ini saya bukan provokasi

tapi memang benar," ujar Fadli saat Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi, Jumat, (19/2/2016).

Meskipun begitu, Fadli yang pernah menjadi Senat Mahasiswa UI, sebagai koordinator advokasi dan demonstrasi mahasiswa UI tentang masalah internasional dan domestik (1992 - 1994) mengakui pentingnya peran mahasiswa sebagai gerakan ekstra parlementer. Di samping itu organisasi mahasiswa dinilai mampu mencetak mental kepemimpinan.

"Kalau saya melihat gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa seperti KAMMI, HMI, PMII, PMKRI dan sebagainya sangat diperlukan, sebagai bagian dari pilar-pilar pemuda mahasiswa, yang menggodok kepemimpinan, kemampuan ber-organisasi," ungkap Fadli.

Mantan aktivis zaman pergerakan 98 ini mengatakan mahasiswa kalah terorganisir dan kalah militan dari buruh karena, menurut Fadli tuntutan buruh

lebih spesifik, lebih menyangkut pada hajat hidup kelompoknya. Permintaan pada upah layak, hal ini yang membuat gerakan buruh lebih militan dan terorganisir, dan usia status buruh juga lebih panjang.

"Kalau mahasiswa kan usianya hanya empat sampai lima tahun, itu juga salah satu kendala," tutur Fadli memberi alasan.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, masyarakat banyak berharap kepada mahasiswa agar lebih terdengar lagi suaranya, jangan diam apa lagi terkooptasi. "Amat disayangkan kalau ini menjadi legacy (warisan) yang tidak bagus pada generasi yang sekarang, harus terpelihara daya kritisnya," harap Fadli.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat V ini juga menandaskan kepada mahasiswa agar melatih kemampuan dan daya kritis terhadap pemerintah dan DPR. Karena menurut Fadli yang menjadi mahasiswa saat ini, di masa yang akan datang tentu melanjutkan sistem kenegaraan.

"Hampir semua tokoh mengalami masa-masa itu, para pendiri bangsa juga gitu. Kami berharap pada organisasi-organisasi mahasiswa tetap menjadi elemen yang mencerahkan, mencerdaskan dan juga mempunyai kemampuan dalam mengkritik sebagai bagian yang penting untuk menyehatkan kehidupan bangsa," tandasnya. *(eko,mp)/foto: andri/parle/iw.*



Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon



Anggota Komisi II DPR Hetifah

Persoalan pengangkatan Tenaga Honorer K2 yang belum pasti menyita perhatian banyak kalangan. Bahkan beberapa waktu lalu ribuan Tenaga Honorer melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Persoalan utama dari pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS adalah tidak adanya payung hukum dan anggaran APBN. Hal tersebut diungkapkan Hetifah, Anggota Komisi II

DPR DORONG PENYELESAIAN MASALAH TENAGA HONORER

dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Senin (22/2).

"Problem utama pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS seperti disinggung pada rapat ini adalah belum adanya payung hukum dan ketersediaan anggaran" ujarnya di Senayan.

Namun demikian, rapat Komisi II dengan mitra tersebut membawa kabar baik bagi para Tenaga Honorer. Pasalnya, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran menjamin adanya dana untuk

rekrutmen. Demikian pula dengan Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM, juga menyatakan akan siap membantu menyelesaikan persoalan payung hukum untuk pengangkatan Tenaga Honorer tersebut.

Pernyataan dari kedua Dirjen tersebut disambut baik oleh Hetifah. Anggota Komisi II yang juga Anggota Banggar DPR tersebut menyatakan dukungannya atas apa yang menjadi rencana Pemerintah (pengangkatan Tenaga Honorer). "Kita (DPR) akan selalu mendorong dan mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengangkatan Tenaga Honorer ini" sambungnya. *(hs,mp)/foto: arief/parle/iw.*



Fadli Zon Ajak Mahasiswa Teladani Pemikiran Bung Hatta

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menjadi pembicara utama dalam Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi Jumat, (19/2). Dalam kesempatan itu, dia mengajarkan kepada para peserta mukernas dari berbagai perwakilan kepengurusan daerah mulai dari Aceh sampai Papua untuk kembali meneladani ideologi demokrasi yang diajarkan oleh Bapak Pendiri Bangsa Mohammad Hatta.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat V ini mengungkapkan, bahwa demokrasi yang diajarkan oleh Bung Hatta merupakan basis ideologi politik yang brilian. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi sosial, yakni himpunan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

"Demokrasi kita bukan demokrasi an sich demokrasi politik, yang hanya mengutamakan kebebasan, tapi juga bukan hanya sekedar demokrasi ekonomi yang mengedepankan persamaan. Demokrasi kita kata Bung Hatta adalah gabungan dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yaitu menjadi demokrasi sosial," tegas Fadli disambut tepuk tangan riuh dari peserta mukernas.

Politisi dari Farksi Partai Gerindra ini menjelaskan, demokrasi sosial berbasis

pada tradisi dan budaya gotong royong dan musyawarah mufakat yang telah ada pada kearifan nusantara. Dia juga mengatakan, Negara Indonesia memilih demokrasi menjadi pilihan dalam sistem politik nasional telah melewati proses perdebatan panjang.

Fadli yang semasa kuliah pernah menjadi Sekretaris Umum di Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengutip pemikiran Bung Hatta, karena dia mengakui bahwa pemikirannya cukup tajam dan konseptual dalam persoalan kenegaraan. Dia menyimpulkan pemikiran Bung Hatta ada empat poin yang inti dari semua itu adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia.

Empat poin tersebut adalah, kecukupan pangan, kecukupan sandang, hunian yang layak untuk segenap rakyat, dan kesehatan serta jaminan hari tua. "Itu kata Bung Hatta tentang kebahagiaan," ujar Fadli.

Fadli yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 2010 - 2015 ini mengatakan, sebenarnya tujuan bangsa ini bernegara, bukan hanya untuk kesejahteraan saja, tapi lebih dari itu adalah kebahagiaan untuk seluruh rakyat

Indonesia. Meskipun dia mengakui yang dimaksud kesejahteraan itu relatif menurut penilaian seluruh orang.

"Kesejahteraan itu memang relatif antara satu orang dengan orang lain, tapi intinya hidup kita di Indonesia tidak tersia-sia dan ada jaminan terhadap hidup kita," jelas Fadli.

Masih mengutip pemikiran Bung Hatta, Fadli yang pernah menjadi Dewan Redaksi, Majalah Sastra Horison ini, mengatakan para bapak pendiri Bangsa Indonesia tidak tekstual mengadopsi kapitalisme, liberalisme, dan komunisme. Tapi para pendiri bangsa melakukan asimilasi terhadap nilai-nilai positif yang terkandung dari banyak ideologi, dengan mempertimbangkan budaya lokal nusantara.

Dalam ceramahnya Fadli juga mengajak mahasiswa untuk memiliki nalar kritis menghadapi globalisasi. "Kita menghadapi globalisasi dan demokratisasi. Kita menganggap bahwa demokrasi adalah jalan yang benar, tetapi kita juga harus kritis, demokrasi macam apa yang cocok untuk Indonesia?" tanya Fadli kepada para kader KAMMI (*eko,mp*)/foto:andri/parle/iw.



Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon usai menjadi pembicara dalam Mukernas KAMMI

KOMISI III TINJAU GEDUNG BARU KPK

Sebagaimana undangan KPK (komisi pemberantasan korupsi) dalam Rapat dengar pendapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan sebelumnya, Senin (22/2) Komisi III meninjau gedung baru KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta selatan.

"Kedatangan kami, tiga puluh dari 53 anggota komisi III DPR RI hadir di tempat ini (gedung baru KPK) dalam rangka meninjau gedung baru KPK. Karena sebagaimana diketahui KPK merupakan mitra kerja Komisi III," ungkap Wakil Ketua

Komisi III, Benny K Harman saat mengunjungi gedung KPK.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu, sebagai mitra kerja KPK, Komisi III DPR RI ikut mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya, memberantas korupsi. Salah satunya lewat dukungan anggaran, yakni dengan pembangunan gedung KPK yang baru.

Pada kesempatan itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan peresmian gedung baru KPK itu telah berlangsung pada 29 Desember 2015 lalu, yakni bertepatan

dengan hari lahir KPK. Pembangunan gedung baru tersebut dilanjutkan Agus memiliki konsep yang smart, secure dan green.

Dengan adanya gedung baru tersebut, Benny yang diamini pimpinan serta anggota Komisi III lainnya seperti Trimedya Panjaitan, Asrul Sani, Adies Kadir, Abubakar Al Habsy, Andhika, Marisa, M.Syafi'i dan beberapa anggota lainnya berharap agar KPK dapat lebih profesional, dan kredibel dalam menjalankan tugas-tugasnya. (Ayu)/foto:runi/parle/iw.



Anggota Komisi III DPR foto bersama Pimpinan KPK

ISU korupsi sudah menjadi wacana internasional yang cukup eksis hingga saat ini. Hal itu tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara Irak dan Kurdistan Irak. Hal ini yang membuat Komisi III melakukan diskusi dengan Member of Delegation of National Integrity Commission in Iraq dan Integrity Commission in Kurdistan Region-Iraq terkait pemberantasan korupsi pada Selasa, (23/02) di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang membuka kegiatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran delegasi integritas ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. "Atas nama DPR, Komisi III menyampaikan terima kasih kepada

Komisi III Diskusi dengan Delegasi Integritas Irak dan Kurdistan

delegasi integritas Irak dan Kurdistan atas kunjungannya ke DPR dan diskusi pada pagi hari ini," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi, menyampaikan bahwa Indonesia dan Irak memiliki ragam kesamaan identitas yang melekat. "Kami terus mengikuti perkembangan di Irak. Seluruh bangsa Indonesia berharap Irak selalu menjadi negara yang baik. Kita memiliki kondisi

sosial yang sama, misalnya Indonesia sama dengan Irak karena memiliki komunitas muslim yang cukup besar," papar Anggota Fraksi Partai Nasdem Dapil Jawa Timur IV ini.

Taufiqulhadi juga menyampaikan bahwa pendirian lembaga KPK di Indonesia adalah respon terhadap gelombang reformasi di Indonesia serta mendukung perkembangan demokrasi yang akuntabel di Indonesia. Sehingga untuk menentukan pimpinan KPK



Anggota Komisi III DPR bersama Delegasi Integritas Irak dan Kurdistan

melibatkan Presiden dan DPR secara bersama-sama. "Itu adalah respon terhadap reformasi Indonesia dan mendukung demokrasi di Indonesia. Di Indonesia pimpinan KPK diseleksi oleh

Presiden lalu dikirimkan sebanyak 10 calon ke DPR, lalu DPR akan menetapkan separuhnya. Dalam konteks itu kami juga melihat peran KPK sangat positif dalam pemberantasan korupsi," paparnya.

Di akhir paparannya, Taufiq juga menjelaskan tentang prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang cukup baik berdasarkan rilis *Transparency International* yang mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) membaik 30 peringkat dan menjadi negara ketiga terbaik di ASEAN. "Karena itu kami akan selalu komitmen menjaga peran KPK," papar Taufiqulhadi sambil mengakhiri.

Adapun delegasi yang mewakili *Member of Delegation of National Integrity Commission in Iraq dan Integrity Commission in Kurdistan Region-Iraq* adalah Ahmaed Anwer Mohammed, Bassim Jasim Hajwal, Musher Rasheed Ibrahim, Jabbar Awaid Jassim, Dana Sofi, Emad al-Shekh dan Ayad Khalid Sediq. (hs,mp)foto: andri/parle/hr.

KPK DIHARAPKAN TETAP JADI TRIGGER MECHANISM PEMBERANTASAN KORUPSI

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyatakan pandangannya tentang KPK untuk tetap menjadi *trigger mechanism* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat melakukan diskusi dengan *Member of Delegation of National Integrity Commission in Iraq dan Integrity Commission in Kurdistan Region-Iraq* di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (23/02).

"Kewenangan KPK adalah koordinasi, supervisi, monitoring dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap persoalan korupsi. Di dalam kewenangan tersebut, maka KPK diharapkan tetap bisa menjadi *trigger mechanism* pemberantasan korupsi di negeri ini," ujarnya.

Kepada delegasi tersebut, Didik juga menceritakan sejarah lahirnya KPK dari kondisi pemerintahan Orde Baru yang belum efektif dalam penanganan korupsi. "KPK lahir dari kondisi 30 tahun pemerintahan di Indonesia yang dianggap terjadi perilaku koruptif bangsa. Karena lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum efektif dalam menangani korupsi maka lahirlah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) di era reformasi," papar anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Timur IX ini.

Dalam acara tersebut, antara delegasi dan Komisi III DPR saling bertukar informasi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Irak. Meskipun begitu, Didik juga menyampaikan bahwa KPK memiliki banyak capaian namun tetap harus ada perbaikan-perbaikan.

Adapun delegasi yang mewakili *Member of Delegation of National Integrity Commission in Iraq dan Integrity Commission in Kurdistan Region-Iraq* adalah Ahmaed Anwer Mohammed, Bassim Jasim Hajwal, Musher Rasheed Ibrahim, Jabbar Awaid Jassim, Dana Sofi, Emad al-Shekh dan Ayad Khalid Sediq. (hs,mp) foto: Andri/parle/od



Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto

Masyarakat Pesisir Segera Mendapat Perlindungan



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat Forum Legislasi di Press Room

MASYARAKAT di kawasan pesisir segera mendapat perlindungan hukum sekaligus pemberdayaan lewat regulasi baru yang sedang dibahas oleh Komisi IV DPR RI. RUU ini berjudul Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, mendapat porsi perhatian lebih. Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendukung RUU yang digagas Komisi IV tersebut. Topik ini mengemuka

dalam acara Forum Legislasi yang membahas RUU ini di lobbis Nusantara III, Selasa (23/2).

Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Panja RUU itu, Herman Khaeron (F-PD), Rizal Damanik pengamat perikanan, dan Syarif Wijaya Sekjen KKP. Herman mengungkapkan, RUU ini sebenarnya sudah masuk Prolegnas pada periode lalu. Kini, Komisi IV aktif kembali merumuskannya dan dijadwalkan pada awal Maret sudah masuk ke Rapat Paripurna.

Dikatakan Herman, masyarakat yang

tinggal di kawasan pesisir umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi pekerjaan kaum pesisir juga penuh risiko, khususnya para nelayan yang mencari ikan hingga ke tengah lautan. RUU ini, lanjut Herman, ingin membuka akses kemudahan bagi nelayan, pembudidaya, dan petambak untuk mendapat jaminan risiko kerja, asuransi, dan permodalan. "Sasarannya agar ada jaminan kepastian usaha bagi mereka," kata Herman.

Anggaran untuk itu, ungkap Herman, sudah ada sebesar Rp250 miliar. Bahkan, kelak ada unit khusus nelayan, pembudidaya, dan petambak (NPP) di semua perbankan nasional untuk mengakses permodalan. Ketergantungan NPP pada tengkulak untuk menjual hasil tangkapan dan budidaya, segera dirubah budidya. Dengan begitu, NPP tidak lagi bergantung pada ijon dan tengkulak yang kerap meresahkan.

Sekjen KKP Syarif Wijaya mengapresiasi kehadiran RUU ini. Menurutnya, profesi nelayan pembudidaya, dan petambak mendapat payung hukum yang jelas. "Pemerintah pun siap menjalani RUU ini bila sudah disahkan. Tentu saja ini untuk kesejahteraan mereka," ucap Syarif.

Sementara itu, pengamat perikanan Riza Damanik mengungkapkan, 56 persen pemenuhan kebutuhan pangan nasional berasal dari ikan. Konsumsi ikan masyarakat Indonesia, ternyata di atas rata-rata masyarakat dunia. Dan kebutuhan ikan Indonesia, 70 persennya dipasok dari para nelayan. "Bila profesi nelayan, pembudidaya, dan petambak tidak dilindungi, angka kemiskinan di Indonesia bisa bertambah," paparnya. (mh) foto: arief/parle/hr.

Komisi VII Minta Harga BBM Diturunkan

Komisi VII meminta kepada pemerintah, agar segera menurunkan harga BBM. "Karena di saat harga minyak dunia sudah turun, maka harga BBM sekarang ini juga harus segera diturunkan. Tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak menurunkan harga BBM," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di gedung

parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

"Untuk masalah kepentingan masyarakat luas, maka selayaknya pemerintah segera menyikapi masalah ini. Jangan sampai seakan-akan rakyat lah yang mensubsidi pemerintah", lanjut politisi Demokrat.

Menurut dia, sebenarnya masih lebih baik pada era sebelumnya, yakni



Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi



pada jaman pemerintahan presiden SBY. Sebab pemerintahan saat itu membuat perencanaan harga BBM secara stabil untuk jangka waktu satu tahun. Naik turunnya harga dicover oleh pemerintah.

Sistem yang diterapkan oleh pemerintahan yang lama dirasa lebih klop, sebab dari sisi perencanaan bisnis,

dan dari sisi pengusaha juga punya kepastian.

Dia mengatakan, kalau harga minyak dunia sedang naik, maka pemerintah akan mensubsidi. Tapi jika harga minyak dunia turun maka pemerintah menerima pendapatan.

"Komisi VII menilai, pola sistem

fluktuasi harga minyak yang digunakan pemerintah saat ini, dianggap kurang tepat. Tapi kalau pemerintah tetap ingin mengikuti dan menggunakan pola fluktuasi harga pasar minyak dunia, maka pemerintah juga harus bersikap konsisten," tandas Mulyadi. *(dep,mp)*

Foto : Azka/parle/od

PEMERINTAH PERLU TEGAS CEGAH PERLUASAN LGBT



Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarijanto

Anggota Komisi VIII Itet Tridjajati Sumarijanto menyatakan keprihatinannya terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Pemerintah diminta tegas untuk melakukan pencegahan, pemantauan, dan pembinaan agar tidak terjadi penyebaran.

"Perilaku itu (LGBT) menyimpang,

perilaku yang tidak normal itu harus diperbaiki, dan harus ada pembinaan," kata Itet, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan banyak sekali pendapat-pendapat mengenai

penyebab terjadinya LGBT. Ada yang berpendapat bahwa itu genetik, menular, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pada di masa kecilnya tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

Sedangkan menurutnya yang paling tepat adalah orang menjadi LGBT ketika masa kecil anak tidak mendapat perhatian dari orang tua, sehingga mencari kasih sayang dari orang lain, dan kebetulan orang lain memberi respon maka terjadilah LGBT itu.

Dia menegaskan solusinya adalah Kementerian PP dan PA harus membuat program pencegahan, jangan sampai terjadi anak-anak tidak bahagia di rumah. "Kementerian ini harus membuat program, untuk melakukan dan mensosialisasikan pembentukan keluarga yang melindungi hak anak," ungkapnya.

Hal ini juga dibesarkan oleh media termasuk social media, menjadikan keprihatinan yang serius, sehingga jangan dibiarkan ini. "Untuk itu pemerintah harus tegas, social media harus dipantau agar tidak menyebarkan hal itu. Perilaku menyimpang dan perilaku yang tidak normal itu harus diperbaiki," katanya.

(as)/foto: kresno/parle/iw.

PEMERINTAH DIMINTA LARANG ANAK SEKOLAH BAWA HP BERAKSES INTERNET

KETUA Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk melarang anak-anak sekolah membawa telepon genggam (handphone) yang dapat mengakses internet. Hal ini karena menurut pantauannya situs porno masih banyak yang bisa diakses di Indonesia.

"Periode yang lalu seingatnya situs porno sudah di block, namun sekarang makin banyak. Hal ini penting, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) melarang anak-anak sekolah tidak boleh membawa handphone yang bisa mengakses internet," katanya, dalam

Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri PP dan PA Yohana Susana Yembise, Senin (22/2/2016) di Gedung DPR, Jakarta.

Menurutnya larangan tersebut bagus untuk diterapkan secara serius, karena anak-anak sekolah belum masanya mengakses telepon genggam yang berinternet. Hal ini juga ada pengaruh



Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berdialog dengan Menteri PP dan PA Yohana Susana Yembise

dari anak-anak yang lain punya handphone dengan harga mahal itu membuat anak yang lain menjadi minder karena tidak punya handphone mahal.

"Kesadaran dari orang tua dan pihak sekolah, sekaligus Kementerian PP dan PA meyakinkan mereka, kalau perlu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh atas larangan tersebut. Selanjutnya Kementerian PP dan PA melakukan pemantaunya," tegasnya.

(as)/foto:kresno/parle/iw.

PENJUALAN OBAT SECARA ONLINE PERLU PERHATIAN KHUSUS

Komisi IX DPR RI meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI mengawasi penjualan obat dan makanan secara online dengan komprehensif. Maraknya penjualan obat online ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebagaimana kita ketahui pengertian dari WHO 50% obat yang dipasarkan secara online diragukan keasliannya maksudnya palsu.

Hal ini disampaikan anggota Komisi IX DPR John Kenedy Azis saat rapat dengar pendapat dengan BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). BPOM harus terus mengawasi, karena masalah obat tidak bisa main-main.

Lebih lanjut politisi Golkar ini menambahkan, seharusnya BPOM lebih pro-aktif dalam bekerja, misalnya apabila menemukan obat KW/Palsu yang dapat membahayakan masyarakat, harus segera melapor ke polisi. BPOM juga harus memanfaatkan banyaknya penyidik sipil yang dimiliki hampir 500 orang lebih. Karena kewenangan penyidik sipil BPOM sama dengan penyidik polisi dan kejaksaan.

"BPOM juga perlu meningkatkan kemampuan penyidikan, karena kewenangannya sudah tinggi hal ini harus dimanfaatkan. Kewenangan menuntut memang tidak boleh sebagai mana polisi, karena itu harus kerjasama dengan jaksa, kemudian hasil penyidikan BPOM bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan menindak lanjuti" ujarnya.

Ditegaskan Azis, bukan hanya peredaran obat online yang harus menjadi perhatian BPOM, beredarnya obat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur juga harus menjadi perhatian. Apalagi harga yang terbilang jauh lebih murah dibandingkan apotek, hal ini pasti menjadi tempat tujuan masyarakat.

"BPOM harus segera menyelidiki kualitas obat di sana. Jika obatnya benar memang membantu masyarakat tetapi kalau obat palsu, membahayakan masyarakat," tandas politisi Dapil Sumbar ini, dengan menekankan, harus ada hukuman yang dapat membuat para pelaku ini jera. Bahkan dia menegaskan, pasar obat tersebut ditutup. *(rnm,mp)/foto:jayadi/parle/iw.*



Anggota Komisi IX DPR John Kenedy Azis



KOMISI IX DESAK BPOM TINGKATKAN PENGAWASAN OBAT ILEGAL



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

KOMISI IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat ilegal dan substandar, dengan meningkatkan koordinasi bersama para penegak hukum. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM), Senin (22/2) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang dipimpin Ketua Komisi Dede Yusuf, Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa, Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk mengawasi secara komprehensif penjualan obat dan makanan secara *online*.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA) oleh BPOM dan mendorong BPOM RI untuk lebih memperluas jangkauan dari GN-POPA dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Selanjutnya Komisi IX DPR RI mendorong BPOM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini juga mendesak BPOM RI untuk memanfaatkan kenaikan alokasi anggaran dengan sabaik-baiknya, terutama anggaran untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota Komisi IX DPR RI.

Di bagian lain, Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memperkuat terbitnya aspek legal berupa peraturan daerah dan turunannya terkait norma, standard, prosedur, dan kriteria.

Di bidang legislasi, Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk secara pro-aktif menginisiasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. *(rnm,mp)/foto:jayadi/parle/iw.*

Siklus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi dari waktu-waktu, seharusnya sudah bisa diantisipasi. Sehingga, dapat dilakukan pencegahan maupun penanggulangan agar wabah ini tidak menimbulkan korban. Namun sangata disayangkan, kualitas penanganan masih belum meningkat.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri, saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Bengkulu, Jumat (19/02/2016) lalu. Penanganan Kejadian Luar Biasa (DBD) menjadi fokus pembahasan saat pertemuan antara Tim Komisi IX DPR dan Wakil Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan, Wakil Direktur RS M Yunus, dan jajaran SKPD lainnya.

"Dari waktu ke waktu, DBD sudah bisa

SIKLUS DBD BISA DIANTISIPASI

diantisipasi. Rata-rata terjadi dari Desember, Januari hingga Februari. Dengan kita mengetahui siklusnya, mestinya Kementerian dan Pemda sudah bisa mengantisipasi itu. Dengan mengetahui langkah-langkah siklus itu, seharusnya dapat segera disiapkan, langkah promotif dan preventif," tegas Syamsul.

Politisi F-PG itu menambahkan, pihaknya memberikan perhatian besar pada masalah DBD ini. Sehingga, Komisi IX menyetujui anggaran promotif dan preventif yang sangat

tinggi pada anggaran tahun 2016. Akibat dari tidak meningkatnya langkah promotif dan preventif, hal ini berdampak pada kejadian mewabahnya DBD ini di Bengkulu, hingga berstatus KLB.

"Pengalaman tahun 2016 ini, kami minta untuk menjadi antisipasi agar tidak terulang lagi. Siklusnya kita sudah tahu, untuk itu, langkah promotif dan preventif harus kita tingkatkan. Sehingga kita tidak jebol pada saat penanganan. Kejadian di Bengkulu ini sangat memprihatinkan, karena sampai



Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri berdialog dengan pasien DBD di RS M Yunus Bengkulu

merenggut nyawa," sesal Syamsul.

Politisi asal dapil Sulawesi Selatan ini juga berharap kepada BPJS Kesehatan agar kinerjanya lebih baik lagi saat penanganan KLB DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Amin Kurnia mengatakan, langkah yang dilakukan Pemprov Bengkulu dalam menanggulangi wabah DBD dengan

melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan dengan gerakan Jumat bersih dan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus melalui media cetak dan elektronik.

Berikutnya dengan melakukan pelatihan tenaga di Kabupaten dan Kota dan Puskesmas se-Provinsi Bengkulu tentang

pengecahan dan penanganan kasus DBD. Untuk bantuan terhadap korban DBD sudah dilakukan dan diberikan oleh masing-masing Pemda dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Seluruh masyarakat miskin yang menjadi korban DBD, baik sakit maupun meninggal, dan memiliki Kartu BPJS atau KIS, seluruhnya mendapat bantuan dari BPJS.

Dinkes Provinsi Bengkulu juga melaksanakan *fogging* fokus radius 100 meter dari rumah positif kasus DBD, penyuluhan dan promosi kesehatan ke masyarakat, pemberian abate kepada masyarakat melalui Puskesmas, mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD di Kabupaten dan Kota.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati (F-PDI Perjuangan), Nursuhud (F-PDI Perjuangan), Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), Suir Syam (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Handayani (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), dan Muhammad Iqbal (F-PPP).

Selain ke Bengkulu, Komisi IX DPR juga menyebarkan timnya ke daerah lain, yakni Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan. *(sf)/foto:sofyan/parole/iw.*

RUU Jasa Konstruksi Akan Tingkatkan Daya Saing

Komisi V DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jasa Konstruksi. RUU yang akan menggantikan UU nomor 18 tahun

1999 tentang Jasa Konstruksi, salah satu tujuannya untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi

Muhidin M. Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (24/02/2016).

Muhidin mengatakan, setidaknya 50 persen substansial dari UU yang lama akan mengalami perubahan pada RUU inisiatif DPR itu. Mengingat, UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang belaku saat ini hanya terdiri dari 11 Bab dan 46 pasal. Sementara, dalam RUU yang akan mulai dibahas pekan depan itu terdiri dari 15 bab dan 113 pasal. Substansial yang berubah, akan menekankan sejumlah aspek, salah satunya adalah pembinaan jasa konstruksi.

"Perubahan klasifikasi usaha yang tadinya hanya pada bidang arsitektur, sipil, mekanikal, kelistrikan, dan tata lingkungan menjadi klasifikasi pada central product classification yang terbagi dalam tiga jenis usaha, yakni Jasa Konstruksi, Jasa Pelaksana



Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said



Konstruksi, dan Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi," jelas Muhidin.

Politisi F-PG itu menambahkan, dalam RUU tersebut peran Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR juga akan ditegaskan dengan menjadi leading di sektor konstruksi dalam hal pembinaan yang meliputi, pembinaan sumber daya manusia, pengembangan usaha jasa konstruksi, pengembangan material dan teknologi konstruksi, pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, pengembangan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Hal lain yang menjadi substansi pembahasan RUU adalah mengenai gaji pekerja konstruksi. Nantinya, Pemerintah akan menetapkan standar upah minimal untuk tenaga kerja konstruksi, atau remunerasi, yang selama ini dinilai sangat rendah jika bersaing dengan para pekerja asing. RUU ini telah mengakomodasi untuk merumuskan standar remunerasi minimal yang harus ditetapkan pemerintah.

"Remunerasi salah satu hal yang tidak kalah penting, karena menyangkut bagaimana kesejahteraan tenaga kerja konstruksi, utamanya para tenaga ahli yang harus diberdayakan dengan salary yang pantas," imbuh Muhidin.

Terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Muhidin mengatakan tidak mengalami banyak masalah, karena sebelumnya sudah melalui dikusi panjang lebar, antara lain bagaimana Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Ditargetkan selesai bulan Mei, karena hampir semua isi dalam RUU sudah didiskusikan panjang lebar," harap politisi asal dapil Sulawesi Tengah itu.

Menanggapi soal remunerasi, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan remunerasi nantinya tidak hanya soal peningkatan gaji, melainkan ada bentuk penghargaan lain yang diberikan kepada mereka yang berprofesi di bidang jasa konstruksi.

"Tidak hanya soal take home pay, dengan ditingkatkannya remunerasi juga akan meningkatkan daya saing nantinya, coba sekarang kita lihat, di universitas, mahasiswa yang masuk fakultas teknik sipil menurun terus jumlahnya," kata Basuki. (sf) Foto: Ojje

KOMISI X KHAWATIR PERMASALAHAN SEPAKBOLA PENGARUHI AG XVIII

WAKIL Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis, khawatir permasalahan sepakbola yang tak kunjung usai, mempengaruhi penunjukkan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018. Pasalnya, jika sanksi FIFA kepada PSSI tak segera diselesaikan, Indonesia terancam gagal menjadi tuan rumah ajang olahraga empat tahunan sekali itu.

Demikian mengemuka saat Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (22/02/2016) sore. Topik utama pembahasan rapat terfokus pada kondisi persepakbolaan Indonesia.

"Tanpa adanya sepakbola, Asian Games 2018 bisa batal. Sponsor juga tidak ada yang mau. Kalau ending-nya mau segera diselesaikan, jangan ditunda penyelesaiannya. Kalau tidak

mau diselesaikan, kenapa harus ada pembiaran persiapan venue Asian Games," tegas Kharis.

Politisi F-PKS itu juga mengingatkan, jika Pemerintah Indonesia gagal menyudahi carut marut sepakbola yang berimbas pada gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah AG 2018, maka negara tetangga siap menggantikannya. Dikabarkan, Tiongkok dan Filipina mengklaim siap menjadi tuan rumah.

"Ini mau diakhiri atau tidak. Kalau mau tetap seperti ini, hentikan persiapan Asian Games 2018. Pemerintah harus menyudahi permasalahan bola dengan happy ending. Karena bola menjadi permasalahan strategis, kalau tidak selesai, perlu kita pikirkan untuk



Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis

interpelasi," ancam politisi asal Dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra. Politisi F-Gerindra itu mengingatkan agar Pemerintah segera menyelesaikan kisruh sepakbola ini. Ia berpesan, agar Komita Ad-Hoc Reformasi PSSI segera menemui Presiden Joko Widodo.

"Ini sangat memalukan bagi negara kita yang besar. Sepakbola bukan hanya menyangkut pesepakbola, tapi ekonomi kerakyatan. Kalau ini tidak ada penyelesaian, kita tidak cocok menjadi tuan rumah Asian Games," tegas politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara, Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya (F-PD) berharap, publik melihat, akibat langkah-langkah inkonsistensi dan kecenderungan intervensi dari Pemerintah, yang menjadi penyebab utama jatuhnya sanksi FIFA.

"Isu saat ini yang mengkhawatirkan adalah soal Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Itu kan kaitannya juga dengan anggaran yang digelontorkan untuk persiapan Asian Games 2018, baik dari Komisi X maupun Komisi V. Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, dan tidak adanya kepastian, ini kan semakin merugikan juga," kata politisi asal dapil Aceh itu.

Menanggapi hal ini, Ketua Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, sepakat dengan pandangan Komisi X DPR. Ia menegaskan, penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games merupakan kepercayaan yang terhormat.

"Perjuangan kita agar sepakbola agar tetap ada di Asian Games. Saya berusaha akan coba sekali lagi bertemu dengan Presiden. Ini kesempatan baik untuk melaporkan semuanya jika ketemu Presiden. Saya akan usahakan," janji Agum. (sf) foto: azka/parle/hr.

Nama Indonesia Bisa Dikenal Melalui Formula 1

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menilai, nama Indonesia di mata internasional dengan bergabungnya pembalap muda Tanah Air, Rio Haryanto di ajang balap Formula 1. Riefky berharap, terjunnya pembalap pertama Formula 1 dari Indonesia ini membangkitkan semangat bangsa.

"Kita sebagai bangsa, membutuhkan satu isu yang membangkitkan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya, melalui hadirnya putra bangsa di balapan bergengsi Formula 1," kata Riefky, usai RDPU dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (22/02/2016) sore.

Riefky menambahkan, prestasi Rio saat ini juga sangat diperlukan sebagai rasa nasionalisme kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia terhadap generasi muda.

Ketika ditanyakan mengenai biaya untuk bergabungnya Rio di Formula 1, Riefky mengakui, pihaknya belum membahas hal itu dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bahkan, Kemenpora belum mengajukan dalam APBN, namun Menpora Imam Nahrawi malah lebih banyak membicarakannya di media massa.

"Ini yang kita sayangkan. Tapi kalau nanti diajukan dan mau dibahas di APBN-2016 pada Mei nanti, pasti akan kita sambut. Masalahnya, apakah sudah

terlambat apa belum untuk diberikan. Karena yang kita tahu, biaya sebesar 15 juta Euro itu, dibagi menjadi 6 termin, dan termin pertama dari keluarga," imbuh Riefky.

Politisi F-PD itu memastikan, pihaknya akan menyambut baik, jika Kemenpora mengajukan biaya untuk Rio dalam APBN-P 2016. Ia memastikan, hal itu tidak akan melanggar aturan. Namun, jika Kemenpora menganggarkan dalam APBN 2016 yang sudah diketok pada akhir tahun lalu, justru itu yang akan melanggar aturan.

Riefky menambahkan, jika memang biaya untuk Rio menjadi terlambat jika dibahas di APBN 2016, ia menyarankan untuk menggunakan anggaran di kementerian lain, misalnya Kementerian Pariwisata. Apalagi, anggaran kementerian yang dipimpin Menpar Arief Yahya untuk tahun ini mengalami kenaikan cukup signifikan.

"Kemepar itu mempunyai program promosi mancanegara mencapai sekitar Rp 3 triliun, di situ yang disosialisasikan adalah program Wonderful Indonesia, yang tujuannya untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, dan menghasilkan devisa bagi negara. Apakah promosinya nanti bentuknya majalah, billboard, ataupun lainnya, termasuk di Formula 1 kan sama saja. Tinggal hitung saja biayanya, itu sama saja dengan advertising," jelas Riefky.

Dengan begitu, tambah politisi asal dapil Aceh itu, jika Kemenpar ingin mengenalkan potensi pariwisata, bisa memanfaatkan media placement di Formula 1. Hal itu, selain membantu atlet, tapi juga untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Rio resmi ikut berlaga di arena balap 'jet darat' selama musim 2016 ini bersama tim balap asal Inggris, Manor Racing Ltd. Walaupun sempat mengalami kesulitan pembiayaan, akhirnya Pertamina membantu menalangi pembiayaan Rio yang mencapai 15 juta Euro atau sekitar Rp 255 miliar. (sf) Foto: Azka/parle/od



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya



KOMISI X DORONG PNRI TINGKATKAN MINAT BACA



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutanto Adil Hendra

WAKIL Ketua Komisi X DPR, Sutanto Adil Hendra mendorong Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), untuk meningkatkan minat baca di masyarakat. Pasalnya, dengan masuknya Indonesia ke era Masyarakat Ekonomi Asean, tentu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

"Kita tidak mau, kualitas SDM kita menjadi rendah, karena minat baca rendah. Oleh karena itu, kita terus memberikan dorongan, bagaimana PNRI, terutama untuk daerah-daerah, untuk menyediakan mobil perpustakaan keliling. Untuk bisa menjangkau, buku-buku kepada daerah yang susah dilewati, agar minat baca meningkat," kata Sutanto, usai RDP dengan Kepala PNRI, Sri Sularsih, di

Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (22/02/2016).

Dalam kesempatan ini, politikus F-Gerindra itu juga mengapresiasi serapan anggaran di tahun 2015 yang mencapai besaran 96,61 persen. Namun ia mengingatkan, jangan hanya semata anggaran terserap, namun dengan hasil yang sesuai dengan harapan.

"Serapan anggaran PNRI ini sangat baik. Kita sampaikan untuk tahun

2016, kita mengharapkan serapan anggaran, bukan hanya daya serapnya, tapi juga manfaatnya terhadap masyarakat, apalagi kita ketahui minat baca dan kualitas pustakawan perlu ditingkatkan," imbuh Sutanto.

Politikus asal dapil Jambi itu juga memastikan, pihaknya mendorong PNRI untuk mengajukan anggaran semaksimal mungkin, jika memang anggaran yang diberikan selama ini menghambat dalam peningkatan minat baca.

"Pada prinsipnya Komisi X mendorong PNRI terus menyampaikan anggaran yang semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kedepan, yang kita harapkan betul, agar generasi mendatang cinta baca dan cinta buku, dan SDM yang bersaing, ini menjadi

terwujud," harap Sutanto.

Sebelumnya, Kepala PNRI Sri Sularsih mengatakan bahwa indeks minat baca masyarakat Tanah Air masih rendah jika dibandingkan negara tetangga. Indeks baca Indonesia per orangnya dalam satu tahun hanya satu judul buku, sementara di Malaysia per orang dalam setahun mencapai tiga judul buku.

"Kami mengadakan survey dan kajian di 12 provinsi. Dari sampel 120 orang per kabupaten dan kota, hasilnya masih sangat tidak menggembirakan. Peringkat sangat rendah. Hasil kajian ini memperlihatkan perlu ada peningkatan minat baca," kata Sri.

Terkait program peningkatan pembudayaan minat baca ini, Komisi X DPR sepakat akan melakukan kunjungan spesifik, diantaranya akan melakukan tinjauan ke perkembangan pembangunan gedung perpustakaan yang telah mencapai 56 persen per 21 Februari 2016.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR juga mengapresiasi realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2015 yang daya serapnya mencapai 96,61 persen atau melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,05 persen.

Sementara untuk persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2016, Komisi X DPR mengingatkan PNRI agar pelaksanaan APBN tahun 2016 tidak sekedar mengejar daya serap. Tetapi pemanfaatan anggaran tersebut harus benar-benar dapat meningkatkan kualitas pustakawan, dan berdampak langsung terhadap masyarakat dalam menghadapi MEA. (sf) Foto: Azka/parle/od

PENURUNAN BI RATE HARUS PACU DUNIA USAHA BERGERAK

Menyusul kebijakan BI yang menurunkan suku bunga BI rate 50 basis poin hingga saat ini, diharapkan bisa memacu gerak dunia usaha nasional lebih kencang lagi. Penurunan BI rate ini harus disambut perbankan nasional dengan menurunkan suku bunganya. Tanpa itu, penurunan BI rate jadi percuma.

Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara

(dapil Sulse I) mengemukakan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/2). Pemerintah harus mendorong, bahkan 'memaksa' perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Upaya paksa ini, jelas politisi PPP tersebut, untuk melihat perubahan suku bunga setelah BI rate diturunkan.

"Saya sebagai Anggota Komisi XI ingin

melihat agar perbankan itu dipaksa menurunkan suku bunga. Inti penurunan BI rate sebenarnya bagaimana perbankan juga bisa menurunkan suku bunganya agar perekonomian bisa bergerak lebih kencang. Tanpa itu, saya kira percuma dan tak berarti," tegas Amir.

Salah satu upaya paksa pemerintah untuk menurunkan bunga perbankan

adalah dengan memasang batas maksimal bunga deposito untuk dana pemerintah dan BUMN yang ditaruh di perbankan. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memaksa perbankan menurunkan suku bunganya. Seperti diketahui, perbankan nasional tidak serempak menyambut penurunan BI rate ini.

Menurut Amir, perbankan yang masih menahan penurunan suku bunganya, itu lantaran ingin menyerap dana murah dari masyarakat lebih banyak. "Mereka cenderung ingin memasang bunga tinggi bagi deposito supaya bisa menarik dana masyarakat. Kalau itu terus dilakukan, ya otomatis bila ingin mengeluarkan kredit ada *rate*-nya. Itulah

yang mungkin perbankan belum merespon secara positif dari turunnya BI *rate*," ungkap Amir.

OJK, lanjut Amir, perlu mengambil langkah-langkah strategis agar dunia perbankan mau menurunkan suku bunganya. Inilah inti dari misi penurunan BI *rate*. Selain itu, penurunan suku bunga perbankan, juga agar perbankan tidak menarik untung terlalu banyak dari masyarakat. *(mh)/foto:arief/parle/iw.*



Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara

Bahas Pembangunan Berkelanjutan, Panja SDGs Minta Masukan SBY



Panja SDGs BKSAP berdiskusi dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

PANITIA Kerja (Panja) SDGs BKSAP minta masukan dari Susilo Bambang Yudhoyono khususnya terkait pembahasan dan penerimaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dulu, ini, kan pak SBY yang ikut

mengawali Millenium Development Goals (MDGs), tentu kita tanya seperti apa dan masukannya bagaimana," ujar Ketua Panja SDGs Nurhayati Ali Assegaf di sela-sela kunjungan ke kediaman SBY di Cikeas, Senin (22/02/2016).

Menurut Nurhayati, saat menjadi Presiden, SBY pernah memimpin Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi Pasca 2015 di Nusa Bali, untuk

merumuskan Agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pasca 2015. Kerangka kerja Agenda Pembangunan Pasca 2015 pernah dibahas di London pada 2012, Monrovia dan Liberia, yang diikuti juga oleh SBY. Dari serangkaian pertemuan itulah, akhirnya setelah MDGs berakhir pada akhir

Desember 2015, akan digantikan oleh SDGs.

MDGs sejauh ini merupakan komitmen 192 negara pada tahun 2000 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 8 target MDGs yang harus dicapai sebelum 2015, selain menghapus kemiskinan yang ekstrem dan kelaparan, memenuhi pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu.

Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs kini menjadi model pembangunan global yang tak hanya mencakup kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang, tetapi juga di seluruh negara yang anggota PBB penerima SDGs. Jika MDGs hanya ada 8 langkah mencapai target kesejahteraan, maka SDGs memiliki 17 langkah pada 15 tahun ke depan.

Pada kesempatan yang sama Anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan, "Di satu sisi ini ranahnya Pemerintah tetapi kan, secara Internasional ada beberapa yang menjadi kesepakatan bersama. Contoh, masalah pertumbuhan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, ini kan menjadi perhatian secara Internasional. Dan itu kita sudah menyepakati karena kita masuk ke dalam organisasi Internasional. Seperti, United Nations ataupun PBB. Kan kita anggota di sana, sementara ada kebijakan dari PBB ini harus begini, kita harus seperti ini, untuk setiap negara."

Lebih lanjut Heri menegaskan, posisi DPR ingin memperkuat Panja ini untuk disampaikan kepada Pemerintah. " Kita ingin memberi dukungan kepada Pemerintah, duduk bersama dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Kita harus mengetahui duduk permasalahan pembangunan berkelanjutan agar saling sinergi satu sama lain. Intinya Panja ini bisa memberikan masukan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, supaya kita bisa bersinergi bersama." tegasnya.

Tim Panja SDGs Nurhayati didampingi Anggota F Gerindra Heri Gunawan, Anggota dari FPKB Siti Masrifah, Anggota dari FNasdem Amelia Anggraini, Anggota dari FPPP Kartika Yudhisti, dan anggota dari F Demokrat Syofwatillah Mohzaib. *(andri,mp)/foto:andri/parle/iw.*



Kesejahteraan Tenaga Honorer Perlu Ditingkatkan

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2 yang saat ini jumlahnya mencapai 80 persen guna meningkatkan pelayanan publik. Hal itu disampaikan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan LAN, BKN, Dirjen Keuangan Kemenkeu, Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (22/01).

"Jadi jangan harap pelayanan publik kita bagus, karena yang melayani adalah honorer. Mereka seakan budak yang menjadi kuli di negara kita sendiri. Pernahkah Jokowi blusukan ke sekolah? Tau gak kalau ada 1 sekolah yang cuma ada satu PNS sisanya honorer semua? Bahkan ada tenaga honorer yang digaji Rp 150.000,- per bulan. Saya tidak kebayang kalau mereka berhenti total, bisa tidak jalan ini pemerintahan," ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Arteria juga mengkritik pemerintah yang terkesan lamban untuk menyelesaikan hal ini dari sisi anggaran. "Kan sudah terbukti bahwa anggarannya bukan tidak ada, tetapi tidak pernah diusulkan oleh MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. Saya kira ini hanya masalah kepedulian," tutur anggota DPR yang juga pernah menjadi Legal Advisor Komite Normalisasi PSSI ini.

Terkait payung hukum, Arteria mengingatkan bahwa presiden memiliki kekuasaan tertinggi untuk bisa mengeluarkan keputusan apa saja terkait kesejahteraan rakyat. "Jangan bicara payung hukum, presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi, dia berhak ngapain aja. Proyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta-Bandung saja tidak pakai aturan hukum. Saya kira ini hanya masalah keberpihakan saja," paparnya. Namun, Arteria menilai meskipun begitu tak pernah ada solusi yang dihadirkan pemerintah terkait honorer K2 ini. (hs,mp)/foto:arief/parle/iw.



Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan

KOMISI I TETAPKAN DEWAS LPP RRI

Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI terhadap 15 calon, akhirnya ditetapkan lima Dewan Pengawas terpilih yakni Mistam, Frederik Ndolu, Hasto Kuncoro, Tantri Relatami dan Rosalita Widiastuti pada Rabu, (24/02/2016).

Dalam rapat intern Komisi I DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi TB Hasanuddin, anggota Komisi I Rachel Maryam Sayidina mengatakan bahwa Komisi I DPR RI sudah berusaha mencari yang terbaik untuk menentukan Dewan Pengawas RRI ini.

"Komisi I telah berusaha mencari *the best from the best* dari yang ada. Tentunya setiap calon pasti punya kelebihan dan kekurangan, dari



Anggota Komisi I Rachel Maryam Sayidina

situ Komisi I memberi penilaian seobjektif mungkin untuk memilih yang terbaik. Kami juga berusaha menggali lebih dalam tidak hanya sebatas visi dan misi saja. Ya mudah-mudahan hasil kerja selama 2 hari ini sesuai dengan ekspektasi," ujarnya ketika diwawancarai usai lakukan uji kelayakan dan kepatutan Dewas RRI.

Rachel juga memberikan harapan

agar dengan adanya Dewas baru ini bisa membawa RRI menjadi lebih baik. "Tentunya jika kami sudah memilih kami berharap dewas RRI bisa membawa RRI menjadi lebih baik dan maju kedepan. Harapannya, itu bisa terealisasi," ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat II ini.

Selain itu, ke depan Komisi I juga

akan berupaya memperkuat RRI melalui penggabungan dengan TVRI melalui UU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). "Tapi UU ini belum dibahas karena Komisi I masih dalam pembahasan UU Penyiaran, nanti setelah UU Penyiaran selesai dibahas, baru kita bicara UU RTRI," pungkasnya *(hs,mp)*. Foto: *Kresno/parle/od*

Ada Investasi Semu Dibalik Pinjaman USD3 Miliar dari CDB

KETUA Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan, ada dugaan investasi semu di balik pinjaman USD 3 miliar dari China Development Bank (CDB) yang dilakukan pemerintah. Ternyata, sudah ada penunjukan kepada para calon penerima pinjaman tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi BUMN, Dirut Bank Mandiri, Dirut BNI, dan Dirut BRI, Senin (22/2), Komisi VI mempertanyakan kebijakan pinjaman sekaligus penyalurannya ke pihak-pihak tertentu. Menurut Hafisz, ini sama saja membatasi kewenangan perbankan kita untuk menyalurkan kredit. "Mestinya bank-bank kita bebas menyalurkan pinjaman itu kepada siapapun," ujar Anggota F-PAN ini.



Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menerima dokumen dari Deputi BUMN

Komisi VI, lanjut politisi dari dapil Sumsel I ini, belum mendapatkan informasi siapa saja nasabah yang sudah menerima pinjaman. Bahkan, disinyalir pada Desember lalu, dana pinjaman itu sudah cair. Melihat kenyataan ini, Komisi VI berkesimpulan bahwa sebelum kredit ini masuk ke bank, sudah ada deal antara pemerintah dengan calon kontraktor yang

mengerjakan proyek infrastruktur.

Hafisz membeberkan, proyek infrastruktur itu ternyata diberikan kepada para kontraktor yang bukan investor sejati. Investor sejati itu, katanya, tidak akan mencari uang di dalam negeri. "Itu namanya jeruk makan jeruk," tandasnya lagi. Idealnya, investor itu membawa uang dari luar negeri kemudian membangun infrastruktur di Indonesia.

Ada investasi semu di balik semua ini. Komisi VI akan terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi penyimpangan. "Kalau, memang, seperti ini cara yang telah dilakukan, berarti kredit yang masuk tidak lebih baik dari kredit ekspor," pungkas Hafisz usai memimpin rapat. *(dep,mp)/foto: jaka/parle/iw.*

DPR Akan Inisiasi RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan akan berupaya menginisiasi lahirnya UU Perubahan Iklim guna menyikapi fenomena perubahan iklim yang saat ini sudah menjadi isu internasional sebagaimana yang tertuang dalam Paris Climate Conference (COP21) di Paris

terkait komitmen Indonesia bersama 195 negara lainnya untuk menahan pemanasan global dari 20 Celcius menjadi 1,50 Celcius.

"Terkait perubahan iklim, DPR akan melakukan inisiasi pembuatan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim. Hal ini diperlukan supaya aksi yang dilakukan

bisa dijalankan dan mengikat secara hukum," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur IX dalam diskusi tentang 'Paris Agreement' and the Way Forward for Indonesia yang diselenggarakan oleh Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI dan UNORCID pada Jumat, (19/02/2016).

Selain itu Satya juga meminta



keterlibatan banyak pihak terkait upaya untuk menekan laju pemanasan global. "Komitmen ini hanya bisa dijalankan apabila seluruh stakeholder, baik parlemen maupun pemerintahan khususnya pihak swasta sebagai pelaku, mempunyai kesamaan pandangan visi dan misi untuk disikapi," papar anggota DPR yang juga sebagai Ketua Kaukus Ekonomi Hijau Parlemen.

Sebagaimana diketahui, gejala perubahan iklim semakin menguat dengan frekuensi dan intensitas dampak

dari cuaca ekstrim sehingga membuat beberapa negara menyatukan pandangannya dalam Paris Agreement, termasuk Indonesia yang sudah menyatakan komitmennya secara sukarela untuk berkontribusi dalam penurunan emisi global.

Indonesia juga telah memiliki acuan RAN GRK (Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan RAN API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim). (*ann;hs,mp*)/foto:runi/parle/iw.



Anggota Komisi VII Satya Widya Yudha

RSWS Makassar Sudah Jauh Lebih Baik



Tim Kunker Komisi IX DPR RI saat mengunjungi pasien di RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar

KONDISI RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah jauh lebih baik. Tidak saja bangunan fisik, tapi juga layanan kesehatan dan kebersihan lingkungannya semakin baik.

Penilaian ini disampaikan oleh Komisi IX DPR RI saat mengunjungi RS tersebut Jumat (19/2/2016). Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Ermalena (F-PPP), menyampaikan apresiasinya kepada Direktur Medik dan Keperawatan

RSWS Khalid Saleh. Tim Komisi IX juga sempat meninjau langsung kamar-kamar pasien. Para pasien itu dimintai komentarnya soal layanan kesehatan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.

Umumnya, para pasien mengaku senang bisa terlayani dengan baik. Sebagian pasiennya ada menggunakan kartu BPJS mandiri dan PBI (penerima bantuan iuran). "Layanan RS di sini sangat bagus," nilai Ermalena kepada pers usai pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dan direktur RSWS. Kunjungan Komisi IX sendiri sebetulnya ingin melihat kejadian luar biasa (KLB) DBD di Sulsel.

RSWS memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 841. Beragam fasilitas kesehatan tersedia di sini, ada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, dan lain-lain. Alat kesehatan juga cukup memadai. Pembangunan fisik terlihat sedang dilakukan. Fisik bangunan dirancang susun ke atas, tidak lagi melebar ke samping yang bisa menghabiskan lahan yang tersedia. Sarana parkir juga sudah tertata dengan baik.

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hatta (F-PG), mengisahkan, ketika ia masih menjadi mahasiswa FKG UNHAS, RSWS terlihat sangat kumuh. Kebersihan tidak terjaga dengan sampah berserakan di mana-mana. Pasien menumpuk hampir di

setiap lorong RS. Kucing berkeliaran bebas. Bahkan, keluarga pasien pun kerap menjemur pakaian di halaman RS.

"Sekarang layanannya sudah jauh lebih baik. Sudah 1000 langkah berubah. Para pasien juga sudah lebih disiplin. Saya tidak melihat lagi keluarga pasien tidur-tiduran di pinggir jalan. Dulu untuk cari wc, cukup mengikuti baunya pasti ketemu. Sekarang saya angkat jempol deh untuk RS. Wahidin," ucapnya penuh apresiasi.

Sejarah RSWS sendiri berawal pada tahun 1947 yang ketika itu masih meminjam dua bangsal RS jiwa Makassar sebagai bangsal bedah dan penyakit dalam. Dua bangsal itu menjadi cikal bakal berdirinya RSUD Dadi. Tahun 1957 RSUD Dadi jadi RS Pemda Sulsel. Selanjutnya berturut-turut menjadi RS dengan klasifikasi B (1993) dan jadi RS vertikal Depkes dengan nama RS Wahidin Sudirohusodo (1994). RSWS kemudian menjadi kelas A sekaligus jadi RS pendidikan dan rujukan tertinggi di kawasan Indonesia Timur.

Pasien dari Indonesia bagian Timur pun berdatangan ke sini, baik dari Papua, Maluku, dan NTT. Pada 2014, RSWS memperoleh dua akreditasi penting berupa akreditasi KARS Paripurna dan dan akreditasi JCI. Bahkan, sejak keluarnya SK Menkes tahun 2014, RSWS ditetapkan statusnya sebagai RS rujukan nasional. (*mh*)/foto:husen/parle/iw.

BPJS Kesehatan di Sulsel Tak Berjalan Optimal



Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta

SETELAH dua tahun berjalan, program layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak berjalan optimal. Bahkan, terkesan kacau. Selain petugas BPJS yang kurang, lagi-lagi sosialisasinya juga sangat kurang.

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiawtie Hatta mengemukakan hal tersebut usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke RS. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Jumat (19/2). Ia menuturkan, di Sulsel masyarakatnya terbiasa mendapat layanan

BPJS. Selama ini Sulsel sudah menjalankan layanan kesehatan gratis untuk masyarakatnya. Tidak perlu lagi membawa kartu dan mendaftar. Ketika masyarakat sudah punya KTP dan KK, maka mereka berhak mendapat layanan kesehatan. Sejak ada BPJS, mereka harus menunjukkan kartu. Kartunya saja tidak tahu didapat dari mana," ungkap Anggota F-PG ini kepada Parleментарia.

Wajar, sambung Ichi-sapaan akrabnya- bila kemudian masyarakat bertanya, mengapa kali ini harus bayar bila berobat. "Dulu itu gratis. Sekarang

kesehatan gratis. Sejak ada BPJS Kesehatan, masyarakatnya semakin dibuat repot dengan harus memiliki kartu peserta JKN dari BPJS Kesehatan.

"Di Sulsel kacau sekali. Masyarakat di Sulsel merasa ribet dengan p e n g u r u s a n

malah susah. Direktur BPJS pernah melaporkan kepada presiden bahwa 100% kartu BPJS segmen PBI sudah tersalurkan. Tersalurkan ke mana, ke langit ketujuh?" ujarnya penuh tanda tanya.

Ditambahkan Ichi, soal penerima bantuan iuran (PBI), datanya selalu berubah-ubah. Perubahan status PBI tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, si penerima kini sudah menjadi orang mampu. Ada juga yang sudah meninggal, salah alamat, atau salah jenis kelamin. Ini persoalan yang sering kali ditemukan di daerah. Inilah yang membuat petugas BPJS tidak berani membagikan, sehingga layanan kesehatan bagi PBI terganggu.

Melihat kenyataan ini, Ichi pun mempertanyakan keseriusan BPJS Kesehatan dalam memberi akses layanan kesehatan. "Masalah seperti ini terus berulang-ulang terjadi. Kok, enggak ada solusinya. Niat enggak, sih, direksi BPJS ini. Kini, Komisi IX sudah membentuk Panja BPJS Kesehatan. Kami sudah mulai jalan dan bertemu dengan Kemenkeu, BPS, DJSN, dan Kemensos. Mudah-mudahan bisa kami clear-kan semua persoalannya" tandasnya lebih lanjut.

(mh)/foto:husen/parle/iw.

KOMISI IX SAYANGKAN PENANGANAN WABAH DBD KURANG PROGRESIF

Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri menyayangkan penanganan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Bengkulu tidak dilakukan secara progresif. Wabah yang terjadi di hampir setiap tahun, seharusnya dapat diantisipasi, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara komprehensif.

Demikian dikatakannya saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Bengkulu, dalam rangka memantau perkembangan wabah DBD di Bengkulu yang sudah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). Setiba di Bengkulu, Tim Komisi IX DPR langsung menggelar

pertemuan Wakil Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan, dan jajaran SKPD lainnya di Rumah Sakit M Yunus, Bengkulu, Jumat (19/02/2016) lalu.

"Penanganan DBD tidak ada kemajuan. Ini yang kita sayangkan. Oleh karena itu, ini menjadi masukan kita untuk Kementerian Kesehatan. Apa yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu ini memang kewalahan menghadapi wabah DBD ini. Bahkan ada daerah di Bengkulu yang sudah tidak memiliki dana untuk mengatasi masalah DBD. Ini sangat memprihatinkan," sesal Syamsul.

Politisi F-PG itu menilai, belum ada langkah antisipasi dalam menghadapi wabah yang hampir terjadi setiap tahunnya itu. Ia juga menyayangkan, akibat dari kurang antisipasi ini, menyebabkan korban meninggal berjatuh.

"DBD berulang setiap tahunnya. Sikap kita menghadapi DBD ini masih biasa-biasa saja. Belum ada langkah komprehensif. Kami dari Komisi IX DPR ingin langkah-langkah yang lebih progresif lagi, dan antisipatif lagi kepada wabah yang melanda negeri kita ini," tegas Syamsul.

Tim Komisi IX DPR, lanjut Syamsul, berharap wabah DBD jangan sampai

terjadi lagi di Bengkulu. Apalagi sampai berstatus KLB.

"Kami berharap, tahun depan Bengkulu dapat menjadi model bagaimana penanganan DBD ini dapat ditangani secara komprehensif. Kita berharap pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, tahun depan tidak KLB DBD lagi," harap politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.

Syamsul menambahkan, selain ke Bengkulu, Komisi IX DPR juga mengirimkan beberapa tim untuk memantau perkembangan wabah DBD ini, yakni ke Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Amin Kurnia menjelaskan bahwa saat ini, penyakit DBD sedang berjangkit di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kejadian kasus mulai meningkat secara signifikan sejak musim hujan awal bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan Januari 2016.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri jenguk pasien di Rumah Sakit M Yunus, Bengkulu

"Pada kurun waktu Januari sampai Desember 2015, jumlah kasus DBD sebanyak 1003 kasus, yang artinya kejadian kasus per 100.000 penduduk di Provinsi Bengkulu adalah 53 orang. Padahal, target nasional adalah kurang dari 49 orang per 100.000 penduduk. Sebagian besar kejadian kasus pada kelompok umur produktif, yakni 15 -44 tahun sebesar 60 persen," jelas Amin.

Amin menambahkan, pada akhir tahun 2015, kasus semakin meningkat. Hal

itu bertepatan dengan datangnya musim penghujan, yaitu di awal Oktober 2015 dengan kejadian kasus 113 orang, tidak ada kasus meninggal. November 2015, terdapat 94 kasus dan meninggal 1 orang. Sementara pada bulan Desember 2015, wabah DBD meningkat menjadi 118 kasus dan meninggal 7 orang.

Meningkat bulan berikutnya, masih kata Amin, pada Januari 2016, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, jumlahnya mencapai 307 kasus,

dengan korban meninggal hingga 8 orang. Memasuki bulan berikutnya, update per 18 Februari 2016, terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 577 kasus, dengan jumlah meninggal hingga 3 orang.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati (F-PDI Perjuangan), Nursuhud (F-PDI Perjuangan), Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), Suir Syam (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Handayani (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), dan Muhammad Iqbal (F-PPP).

(sf)/foto:sofyan/parle/iw.

SISTEM RUJUKAN DBD KURANG MAKSIMAL



Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan berdialog dengan pasien di RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS), Makassar

MEMBLUDAKNYA pasien demam berdarah dengue (DBD) di sejumlah rumah sakit (RS) daerah, disebabkan sistem rujukan kurang berjalan maksimal. Puskesmas dan klinik pratama sebagai layanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat belum mengambil perannya secara ideal.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan, usai meninjau kasus penderita DBD di RS Wahidin Sudirohusodo (RSWS), Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/2). Angka penderita DBD terus mengalami kenaikan tajam di Sulsel. Ini membuat kapasitas layanan khusus DBD di RSWS kian berkurang. Masyarakat yang terserang DBD langsung pergi ke RSWS, tidak lagi

ke puskesmas atau klinik terdekat.

Apalagi, pasien dari Papua dan NTT juga berdatangan ke RS ini sebagai RS rujukan untuk kawasan Indonesia timur. "Karena ada KLB DBD dengan pasien yang membludak, layanan kesehatan jadi terasa kurang maksimal. Ini terkait sistem rujukan yang tidak berjalan. Pemerintah kurang sosialisasi dan warga sendiri kurang kesadarannya. Akhirnya, RS jadi puskesmas raksasa," papar politisi Partai Demokrat itu.

Umumnya, lanjut Ayub, pasien DBD yang datang ke RSWS, lantaran merasa peyakitnya sudah darurat. Untuk itu, perlu ditangani segera oleh dokter. Mereka juga merasa tidak yakin dengan layanan RS di kabupatennya. Akhirnya, berduyun-duyun datang ke RS di tingkat provinsi yang jauh lebih besar seperti RSWS ini. Namun, saat yang sama, Ayub menilai, di luar konteks KLB DBD, layanan kesehatan di RSWS sangat baik. (mh)/foto:husen/parle/iw.

Penguatan Institusi Diperlukan dalam RUU Minol



Ketua Pansus RUU Minol Arwani Thomafi.

Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi inisiatif DPR khususnya Panitia Khusus RUU Larangan Minuman Beralkohol.(Minol) dalam menyusun, menjaring aspirasi sekaligus menyosialisasikan RUU tersebut. Hal tersebut diungkapkan Sekertaris daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen saat menerima kunjungan Pansus RUU Minol, Selasa (16/2) lalu di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.

"Terus terang ini pertama kali DPR sebelum membuat undang-undang meminta masukan dan menyosialisasikan ke Papua. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi langkah DPR. Lebih dari itu kami juga sangat mendukung adanya RUU tersebut, walaupun kami sendiri juga sudah ada Perda tentang minuman keras," ungkap Hery.

Senada dengan Hery, Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Guntur Setyanto

juga menyambut baik usul inisiatif DPR tersebut. Ia mengatakan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung segera dilaksanakannya RUU ini. Karena dari data Polri sebanyak 70 persen kejahatan disebabkan karena miras (minuman keras).

Pada kesempatan itu juga mengemuka sejumlah masukan, salah satunya tentang perlunya penguatan institusi untuk dimasukkan dalam RUU tersebut. Guntur menilai hal itu sangat diperlukan agar apa yang diamanatkan undang-undang dapat berjalan dengan baik dan benar. Karena ciri sebuah negara modern bukan hanya menghukum pelaku, namun juga kepada pencegahannya. Dengan demikian ia berharap adanya sebuah sanksi yang tegas terhadap institusi yang tidak menjalankan apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut nantinya.

Menanggapi hal itu Ketua Pansus RUU Minol, Arwani Thomafi mengatakan bahwa masukan-masukan dari pemerintah daerah beserta stakeholdernya sangat berguna untuk memperkaya isi dari pembahasan RUU ini ke depan. Salah satunya adalah agar RUU ini kelak tidak hanya dapat diterima di pusat (Jakarta-red) saja, melainkan juga dapat diterima baik oleh masyarakat di daerah, termasuk di Papua.

"Terkait masukan tentang penguatan institusi, saya menilai hal ini memang sangat diperlukan, karena sebaik dan seagum apapun peraturan kalau tidak dijalankan dengan baik, maka akan sangat percuma. Penerapan sanksi-sanksi terhadap para pelanggar termasuk lembaga-lembaga dan badan yang tidak menjalankan RUU harus ditegakkan," pungkasnya. (ayu)/Foto:ayu/Parle/iw.



PARIPURNA DPR SAHKAN RUU TAPERA MENJADI UU



Ketua Pansus RUU TAPERA Yoseph Umar Hadi dan Pimpinan DPR

Rapat Paripurna ke 19 Masa Sidang III Tahun 2015/2016 Selasa (23/2) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-Demokrat) secara aklamasi mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi UU. Rapat ini diawali dengan laporan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan).

Yoseph menyampaikan bahwa DPR telah serius untuk menyelesaikan RUU inisiatif yang pertama kali dalam periode 2014-2019. "RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Dalam perjalanannya, RUU

ini sudah pernah menjadi inisiatif DPR pada periode 2009-2014 namun tidak berhasil diselesaikan, meski sudah selesai dibahas sampai rapat tingkat 1," ujarnya. Selain itu, RUU ini juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah perumahan terutama bagaimana membantu warga negara yang belum memiliki rumah karena faktor penghasilan. "Inti pokok RUU ini adalah menyediakan payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara baik Indonesia maupun warga asing yang bekerja di NKRI untuk menabung sebagian dari penghasilannya di Bank Kustodian yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera untuk dipupuk dan dimanfaatkan penyediaan rumah murah dan layak," papar anggota DPR yang berasal dari Dapil Jawa Barat VIII ini.

"Apakah RUU Tapera dapat disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Agus Hermanto. "Setuju!" dijawab oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Melalui UU ini, Yoseph berharap akan memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia bahwa rumah bukan lagi sekadar impian, melainkan suatu kepastian untuk mendapatkan rumah. "UU ini bersifat fenomenal karena memberikan solusi yang efektif dan revolutif serta berkelanjutan karena akan menjadi pijakan hukum negara dalam menyediakan rumah murah, layak dan terjangkau," pungkasnya. RUU yang semula terdiri dari 12 Bab dan 78 pasal, setelah dibahas DPR dan pemerintah berubah menjadi 12 Bab dan 82 pasal. *(hs,mp)/foto:tim fotografer/parle/iw.*



BERITA BERGAMBAR



Tim Panja SDGs BKSAP dipimpin Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf meminta masukan perihal Pembangunan Berkelanjutan dari Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Senin (22/2) Foto Andri



Raker Komisi V DPR dengan Menteri PUPR dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemy Francis bahas RUU Jasa Konstruksi, Rabu (24/2) Foto Naefuroji



Ketua PIA DPR Ny.Netty M.Komarudin bersama sejumlah anggota PIA melakukan kegiatan sosial Peduli Kanker di RS Dharmais, Jakarta. Rabu (24/2) Foto Rizka